

Pemberdayaan Pengelola Wisata dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Caruban Desa Gedongmulyo Kabupaten Rembang

Johan Bhimo Sukoco¹, Mohammad Nurul Huda², Yoga Aldi Saputra³, Asih Widi Lestari⁴,
Rosalina Woro Subektie⁵

^{1,2,3,4,5} Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Indonesia

E-mail: johanbhimo@live.undip.ac.id¹, mohammadnurulhuda@lecturer.undip.ac.id²,
yogaaldi@live.undip.ac.id³, asihwidibagus@lecturer.undip.ac.id⁴, rosalinaws@lecturer.undip.ac.id⁵

Article History:

Received: 13 Juni 2025

Revised: 25 Juni 2025

Accepted: 30 Juni 2025

Keywords: *pemberdayaan, wisata, pengelolaan sampah, pegiat wisata*

Abstract: *Problematika sampah masih dihadapi dalam pengembangan wisata di Pantai Caruban. Padahal, Pantai Caruban merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat potensial di Desa Gedongmulyo, Kabupaten Rembang. Penelitian ini bertujuan mengkaji pemberdayaan pengelola wisata dalam pengelolaan sampah di Pantai Caruban, Desa Gedongmulyo, Kabupaten Rembang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi berpartisipasi, dan studi dokumen. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis interkatif dari Miles & Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan pengelola wisata masih menemui berbagai permasalahan, antara lain: aksesibilitas informasi yang rendah, partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang minim, rendahnya akuntabilitas, sampai dengan rendahnya kapasitas organisasi lokal.*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan menjadi titik kunci dalam keberhasilan pembangunan. Pemberdayaan diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi subjek pembangunan. Pelibatan aktif masyarakat dalam formulasi program, implementasi program, hingga evaluasi program menjadi titik kunci dari pemberdayaan masyarakat (Soetomo, 2009). Lebih lanjut, pemberdayaan ini berkaitan dengan proses dalam menciptakan berbagai peluang bagi pengembangan masyarakat melalui pelibatan mereka dalam pembangunan (Sumodiningrat, 2007). Pemberdayaan ini termanifestasi melalui pelibatan masyarakat dalam berbagai program pembangunan, termasuk dalam pengelolaan sampah. Keterlibatan masyarakat dan segenap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) menjadi titik kunci keberhasilan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Hoesein, 2019).

Sampah menjadi problematika yang menjadi perhatian di berbagai sektor, salah satunya di sektor pariwisata. Indonesia mempunyai beragam destinasi pariwisata, akan tetapi pengembangannya masih terbelenggu dengan problematika seputar sampah ini. Wati dan Sudarti

(2021) menyebutkan bahwa pengembangan pariwisata seringkali terhambat karena kurangnya kesadaran pentingnya menjaga kebersihan di sekitar objek wisata. Hal ini dapat dilihat dari tumpukan sampah yang beserakan di sepanjang lokasi objek wisata utamanya di stan-stan pedagang. Adapun sampah-sampah sisa makanan atau minuman dari pedagang kaki lima seringkali juga memperburuk kualitas kebersihan di objek wisata. Hilman (2023) menuliskan bahwa sekitar 90 % sampah plastik yang terbuang ke lautan seringkali berasal dari kegiatan wisatawan di objek wisata.

Pengelolaan kebersihan di objek wisata harus menjunjung tinggi akuntabilitas dari pengelola wisata tersebut (Pangestu, 2021). Hal ini sejalan dengan aspek akuntabilitas yang merupakan elemen kunci keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan Bank Dunia (Narayan, ed, 2002). Tanpa adanya pertanggung jawaban yang baik, maka akan sulit dalam memastikan keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di objek wisata ini.

Di sisi lain, pemberdayaan pengelola wisata perlu didorong dalam peningkatan partisipasinya. Partisipasi/inklusi ini merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan pemberdayaan (Narayan, ed, 2002). Oleh karena itu, pengelolaan sampah ini memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan untuk aktif berpartisipasi mensukseskan program dan kegiatan tersebut. Hal ini penting mengingat pengelolaan sampah tidak mungkin berhasil jika dilakukan secara parsial saja, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh atau komperhensif (Hoesein, 2019).

Lebih lanjut, penguatan organisasi lokal dan akses informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemberdayaan (Narayan, ed, 2002), sehingga pengelolaan sampah berbasis masyarakat perlu mengedepankan sistem terpadu dalam menanggulangi problematika sampah ini (Danielson, et al, 2022). Prinsip ini perlu dikedepankan, karena apabila hanya satu aspek yang diatasi saja maka akan menyisakan permasalahan pada aspek lainnnya.

Pengelolaan sampah diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang bersig dan lestari (Sujarwo, et al, 2014). Kondisi ini tidak sejalan dengan yang terjadi di Pantai Caruban, Desa Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Penelitian ini menyoroti buruknya pengelolaan sampah di sepanjang Pantai Caruban ini. Padahal, pantai yang memiliki luas wilayah sekitar 21 hektar ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Lokasi Pantai Caruban yang cukup strategis (yaitu hanya sekitar 2 kilometer dari Jalan Raya Lasem yang merupakan jalan utama provinsi), menjadi peluang yang diharapkan dapat menggaet wisatawan untuk berkunjung. Namun demikian, banyaknya sampah yang berserakan di sekitar destinasi wisata ini tentu menjadi faktor penghambat rendahnya angka kunjungan wisawatan.

Partisipasi masyarakat cukup rendah dalam pengelolaan sampah. Kondisi ini dapat dilihat dari rendahnya kesadaran mereka dalam membuang sampah di tempat sampah, sehingga tidak jarang ditemui sampah yang berserakan di sepanjang pantai. Selain itu, rendahnya kesadaran wisatawan dalam membuang sampah dengan tertib juga menambah permasalahan pengelolaan sampah di objek wisata tersebut. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat sampah terpilah maupun kontainer. Fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Pantai Caruban sangat minim. Lebih lanjut, Pantai Caruban belum memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sehingga sampah dibuang sembarangan di lahan pribadi milik penduduk yang berlokasi dekat di area pantai tersebut. Hal ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas pengelola wisata dalam pengelolaan sampah.

Beranjak dari permasalahan ini, maka penelitian ini berfokus mendiskripsikan dan menganalisis pemberdayaan pengelola wisata dalam pengelolaan sampah di Pantai Caruban Desa Gedongmulyo Kabupaten Rembang. Fenomena ini dikaji menurut aspek-aspek pemberdayaan yang dikemukakan Narayan, ed (2002), yaitu: akses ke informasi, partisipasi/inklusi,

akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memetakan sejauhmana aspek-aspek ini dipenuhi dalam pemberdayaan pengelola wisata dalam pengelolaan sampah di Pantai Caruban Desa Gedongmulyo Kabupaten Rembang.

LANDASAN TEORI

Pemberdayaan dan Aspek-aspeknya

Pemberdayaan banyak didefinisikan para ahli. Pemberdayaan adalah proses yang memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, melalui pelibatan mereka secara aktif dalam berbagai program, baik dalam merencanakan program, melaksanakan program, sampai dengan mengevaluasi program (Soetomo, 2009). Lebih lanjut, pemberdayaan adalah proses aktualisasi dari berbagai potensi yang dimiliki masyarakat, baik secara individual (*individual self empowerment*) maupun kolektif (*collective self empowerment*), (Adimihardja dan Hikmat, 2001).

Pemberdayaan adalah peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan, melalui pemberian bantuan, baik berupa pendanaan, pelatihan maupun infrastruktur, serta kelembagaan yang diharapkan mampu mendorong kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Sumodiningrat, 2007). Pemberdayaan merupakan ekspansi dari asset serta kemampuan masyarakat marginal dalam berpartisipasi, bernegosiasi, memiliki kontrol, pengaruh, serta memegang akuntabilitas kelembagaan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Narayan, ed, 2002).

Lebih lanjut, Bank Dunia (Narayan, ed, 2002) menyebutkan terdapat 4 (empat) aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya pemberdayaan, yaitu : akses ke informasi, partisipasi/inklusi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal. Berikut ini penjelasan dari masing-masing aspek tersebut :

1. Akses ke Informasi

Aspek ini berkaitan dengan saluran informasi yang menentukan keberhasilan masyarakat marginal dan terpinggirkan dalam mengakses berbagai informasi dari pemerintah maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya. Informasi dari dua arah, yaitu dari pemerintah ke masyarakat, maupun dari masyarakat ke pemerintah sangat menentukan keberhasilan upaya pemberdayaan.

2. Partisipasi/Inklusi

Aspek ini berkaitan dengan pelibatan masyarakat marginal dalam berbagai kegiatan atau program pembangunan. Partisipasi menentukan keberhasilan upaya pemberdayaan. Masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai program agar tercapai keberdayaan mereka. Selain itu inklusi atau pelibatan mereka dalam pembangunan menjadi elemen kunci dalam pemberdayaan.

3. Akuntabilitas

Aspek ini berkaitan dengan pertanggung jawaban pengelola dalam kegiatan atau program pembangunan. Pertanggung jawaban ini bukan hanya pertanggung jawaban administratif, melainkan juga pertanggung jawaban secara politis maupun sosial.

4. Kapasitas Organisasi Lokal

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan organisasi lokal dalam mengkoordinir masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Kapasitas organisasi lokal dalam memobilisasi masyarakat agar dapat memecahkan permasalahan yang mereka hadapi menjadi elemen kunci yang menentukan keberhasilan pemberdayaan.

Sampah dan Jenis Sampah

Sampah adalah sisa buangan dari proses produksi, baik dari sektor industri maupun rumah

tangga (Chotimah, 2021). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menuliskan definisi sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sujarwo, et al (2014) juga mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan manusia yang berwujud padat, baik sampah organik maupun sampah non organik, dimana seringkali dianggap tidak memiliki nilai guna. Beranjak dari sini, maka dapat dilihat bahwa sampah merupakan sisa buangan kegiatan manusia yang berbentuk padat dan seringkali dianggap tidak memiliki manfaat lebih lanjut.

Sampah dapat dikategorikan menurut asalnya, yaitu (Chotimah, 2021) :

- a. Sampah Organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari bahan hayati dan memiliki sifat *biodegradable*. Hal ini berarti bahwa sampah tersebut dapat diuraikan oleh proses alamiah, seperti mikroba dan sejenisnya. Salah satu contoh sampah organik ialah sampah rumah tangga, seperti: sisa makanan, sisa minuman, buah-buahan yang busuk, dan lain sebagainya.
- b. Sampah Anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari bahan non hayati, dimana bersifat *unbiodegradable*. Sampah jenis ini cenderung sulit untuk terurai secara alamiah. Adapun beberapa contoh sampah anorganik ini, seperti : sampah yang berasal dari botol minuman, plastik, dan lain sebagainya.

Aspek-Aspek Pengelolaan Sampah

Aspek-aspek pengelolaan sampah, meliputi : aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek keterlibatan masyarakat, aspek teknik operasional, aspek bisnis, dan aspek pendanaan (Hoesein, 2019). Berikut ini penjelasan dari masing-masing aspek tersebut :

- a. Aspek Hukum. Pengelolaan sampah dalam aspek ini berkaitan dengan kebijakan, regulasi, atau peraturan perundang-undangan, dimana didalamnya berkaitan juga dengan penegakan hukum.
- b. Aspek Kelembagaan. Aspek ini berkaitan dengan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah dalam berbagai tingkatan (masyarakat, RT, RW, Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Kota, dan seterusnya).
- c. Aspek Keterlibatan Masyarakat. Aspek ini berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam program atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dalam aspek ini perlu dilakukan dengan menyusun desain rekayasa sosial (*top down*) yang dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat (*bottom up*).
- d. Aspek Teknis Operasional. Pengelolaan sampah pada aspek ini berkaitan dengan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- e. Aspek Bisnis. Aspek ini berkaitan dengan kerja sama bisnis antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sampah, baik di tingkat hulu maupun hilir.
- f. Aspek Pendanaan. Aspek ini berkaitan dengan alokasi anggaran dalam pengelolaan sampah serta investasi serta sumber daya finansial dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Prinsip Pengelolaan Sampah

Prinsip-prinsip pengelolaan sampah, meliputi: Reuse, Reduce, dan Recycle. Berikut ini penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut (Sujarwo, et al, 2014) :

- a. *Reuse*. Prinsip ini berarti bahwa penggunaan kembali dari material yang dikategorikan sampah. Semisal, penggunaan kembali galon air minum dan lain sebagainya.
 - b. *Reduce*. Prinsip ini berkaitan dengan pengurangan timbulan sampah atau volume sampah.
 - c. *Recycle*. Prinsip ini berkaitan dengan mendaur ulang sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna. Semisal, mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos, dan lain
-

sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sugiyono (2017) menuliskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan pendekatan naturalistik, dimana riset ini diselenggarakan dalam kondisi yang alamiah atau jauh dari intervensi eksternal. Penelitian ini mengkaji pemberdayaan pengelola wisata dalam pengelolaan sampah di Pantai Caruban Desa Gedongmulyo Kabupaten Rembang. Aspek-aspek pemberdayaan masyarakat menurut Bank Dunia (Narayan, ed, 2002) dikaji dalam penelitian ini, meliputi : akses ke informasi, partisipasi/inklusi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi berpartisipasi (*participant observation*), dan studi dokumen. Kumastuti & Khoiron (2019) menuliskan bahwa dalam penelitian kualitatif, wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan. Lebih lanjut, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung suatu fenomena yang dikaji. Pada penelitian ini, peneliti memilih observasi berpartisipasi dengan ikut serta dalam kegiatan pengelolaan sampah di lokasi penelitian. Disisi lain, studi dokumen digunakan untuk memperkuat penelitian ini melalui analisis berbagai dokumen, seperti regulasi pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang, dan lain sebagainya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif menurut Milles & Hubberman (Sutopo, 2002). Adapun model analisis interaktif ini dilakukan dengan berfokus pada 3 (tiga) komponen utama, yaitu : reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Proses dalam analisis data ini berbentuk siklus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan menjadi penting dalam sebuah pembangunan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya bertujuan untuk mendorong masyarakat agar memiliki kapasitas dan kemampuan melalui bantuan material saja, melainkan juga non material. Bank Dunia (Narayan, ed, 2002) menuliskan bahwa pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti : akses ke informasi, partisipasi/inklusi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal. Penelitian ini mengkaji aspek-aspek tersebut dalam pemberdayaan pengelola wisata dalam pengelolaan sampah di Pantai Caruban Desa Gedongmulyo Kabupaten Rembang.

Akses ke Informasi

Akses ke informasi menjadi aspek penting dalam pemberdayaan. Bank Dunia (Narayan, ed, 2002) menyebutkan bahwa masyarakat memerlukan saluran informasi yang baik dalam peningkatan kapasitas mereka. Lebih lanjut, kurangnya aksesibilitas terhadap informasi mengakibatkan masyarakat tidak dapat meningkatkan kapasitasnya dengan optimal. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya aksesibilitas informasi yang dimiliki pengelola wisata dalam pengelolaan sampah di Pantai Caruban Desa Gedongmulyo Kabupaten Rembang. Hal ini dapat dilihat dari minimnya informasi yang dimiliki pengelola wisata terkait berbagai program pengelolaan sampah yang dimiliki pemerintah, seperti Bank Sampah, Rumah Kompos, dan lain sebagainya. Kondisi ini tidak sejalan dengan Sutarno NS (2006) yang menuliskan pentingnya akses informasi untuk saluran bertukar informasi dan pengalaman dalam pemberdayaan

masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan di sepanjang Pantai Caruban juga belum memiliki papan tanda larangan membuang sampah sembarangan. Belum dimiliki penanda informasi ini dapat menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan pengelolaan sampah di Pantai Caruban. Wisatawan diindikasikan akan semakin mengabaikan pentingnya membuang sampah secara tertib di tempat sampah. Minimnya informasi terkait tanda larangan membuang sampah sembarangan atau tanda himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya, membuat masyarakat dan wisatawan mengabaikan pentingnya menjaga kebersihan di sepanjang objek wisata tersebut.

Partisipasi/Inklusi

Partisipasi/inklusi merupakan aspek kunci dalam keberhasilan pemberdayaan. Bank Dunia (Narayan, ed, 2002) menuliskan bahwa suatu program pemberdayaan akan berhasil jika masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Sebaliknya, program pemberdayaan dapat dikatakan gagal jika partisipasi maupun pelibatan masyarakat rendah. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi/inklusi pengelola wisata dalam pengelolaan sampah di Pantai Caruban Desa Gedongmulyo Kabupaten Rembang. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam turut serta pada program pengelolaan sampah. Kondisi ini tidak sejalan dengan Wandersman, et al (2005) yang menyebutkan pentingnya inklusi atau pelibatan masyarakat dalam pemberdayaan.

Potensi penduduk di Desa Gedongmulyo, idealnya dapat menjadi kekuatan dalam memobilisasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pantai Caruban. Hasil penelitian menunjukkan data demografis penduduk di Desa Gedongmulyo tergolong sangat dinamis, dimana jumlah penduduk pada kelompok usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Selain itu, pertumbuhan penduduk di desa ini juga sangat signifikan peningkatannya, yaitu sebesar 1,3 % per tahun. Desa Gedongmulyo memiliki total 5.628 jiwa penduduk. Angka ini terdiri dari jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 2.221 orang, dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 2.210 orang. Jumlah penduduk yang besar ini idealnya menjadi potensi bagi Desa Gedongmulyo dalam pengembangan pariwisata, utamanya dalam pengelolaan sampah di Pantai Caruban. Namun demikian, sayangnya potensi ini belum disadari pengelola sehingga pengelolaan sampah di Pantai Caruban belum terkelola dengan baik.

Pengelolaan sampah di Pantai Caruban dikelola oleh petugas kebersihan. Petugas kebersihan ini secara rutin mengambil sampah dari kios ke kios yang berada di sepanjang Pantai Caruban. Keberadaan petugas kebersihan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan yang bersih di Pantai Caruban. Namun demikian, keberadaan petugas kebersihan ini disisi lain menjadikan sebuah ketergantungan bagi masyarakat pegiat wisata di sekitar pantai. Para pedagang di kios-kios yang terletak di sepanjang Pantai Caruban cenderung menyerahkan permasalahan pengelolaan sampah kepada petugas kebersihan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat (baik pengelola, pelaku UMKM, maupun wisatawan) akan pentingnya menjaga kebersihan pantai.

Akuntabilitas

Aspek kunci berikutnya yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan ialah akuntabilitas. Pertanggung jawaban pihak-pihak yang berkepentingan, baik dalam pengelolaan sumber daya finansial ataupun non finansial menjadi penting dalam pemberdayaan (Narayan, ed, 2002). Hasil penelitian menunjukkan rendahnya akuntabilitas pengelola wisata dalam pengelolaan sampah di Pantai Caruban Desa Gedongmulyo Kabupaten Rembang. Hal ini dapat

dilihat dari permasalahan terkait infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak kunjung mendapatkan solusi. Sedari beroperasi, Pantai Caruban belum memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Adapun selama ini, pengelola wisata membuang sampah di area tanah penduduk yang berlokasi di dekat pantai. Adapun area tanah penduduk yang dijadikan lokasi pembuangan sampah ini berada di pintu masuk Pantai Caruban, sehingga sangat mengganggu keindahan dan estetika wisata.

Pengelolaan sampah di Pantai Caruban sangat minim fasilitas, termasuk tidak dimilikinya kontainer. Lebih lanjut, belum dimilikinya fasilitas kontainer ini membuat sampah berserakan di sekitar Pantai Caruban. Permasalahan ini tidak kunjung mendapatkan respon yang baik dari pemerintah desa setempat. Minimnya infrastruktur pengelolaan sampah, dimana belum dimilikinya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memadai maupun container, ini menjadi indikator rendahnya pertanggungjawaban pengelola. Kondisi ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas pengelola wisata dalam pengelolaan sampah di Pantai Caruban Desa Gedongmulyo Kabupaten Rembang. Kondisi ini tidak sejalan dengan Wandersman, et al (2005) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas ini sangat penting dalam pertanggungjawaban keberlangsungan pemberdayaan masyarakat.

Kapasitas Organisasi Lokal

Aspek keempat yang mempengaruhi pemberdayaan ialah kapasitas organisasi lokal. Aspek ini berkaitan dengan sejauhmana organisasi lokal dapat mendorong masyarakat untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki secara berkelompok (Narayan, ed, 2002). Hasil penelitian menunjukkan rendahnya kapasitas organisasi lokal dalam pengelolaan sampah di Pantai Caruban Desa Gedongmulyo Kabupaten Rembang. Beberapa organisasi lokal seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum menaruh perhatian yang lebih dalam pengelolaan sampah di Pantai Caruban. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah program atau kegiatan yang dimiliki beberapa organisasi lokal tersebut belum mengarah pada pengelolaan sampah. Masyarakat tidak memiliki kemampuan dalam mengatasi permasalahan terkait pengelolaan sampah ini melalui organisasi lokal yang mereka miliki. Kondisi ini tidak sejalan dengan Schneiderman (Wandersman, et al, 2005) yang menuliskan pentingnya pembelajaran organisasi melalui peningkatan penguasaan metode baru dan prinsip perbaikan yang berkelanjutan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Minimnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya infrastruktur sarana dan prasarana, serta tidak adanya dukungan dana yang memadai, menjadi permasalahan mendasar berkaitan dengan rendahnya kapasitas organisasi lokal dalam pemberdayaan pengelola wisata dalam pengelolaan sampah di Pantai Caruban Desa Gedongmulyo Kabupaten Rembang. Hasil penelitian ini juga menunjukkan berbagai organisasi lokal yang dimiliki di Desa Gedongmulyo belum mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) lainnya. Pengelolaan sampah di destinasi wisata ini belum terkoneksi baik dengan pihak-pihak berkepentingan, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) Kabupaten Rembang, dan lainnya.

Beranjak dari hasil penelitian, maka dapat dilihat bahwa pemberdayaan pengelola wisata dalam pengelolaan sampah di Pantai Caruban Desa Gedongmulyo Kabupaten Rembang masih menemui sejumlah permasalahan mendasar. Adapun permasalahan ini mencakup keseluruhan aspek-aspek pemberdayaan yang dikemukakan Bank Dunia (Narayan, ed, 2002), meliputi : akses ke informasi, partisipasi/inklusi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal. Berbagai permasalahan ini terangkum dalam Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel. 1 Matriks Hasil Penelitian

No.	Aspek-Aspek	Hasil Penelitian
1.	Akses ke Informasi	Rendah
2.	Partisipasi/Inklusi	Rendah
3.	Akuntabilitas	Rendah
4.	Kapasitas Organisasi Lokal	Rendah

Sumber: diolah peneliti, 2025.

KESIMPULAN

Pengelola wisata Pantai Caruban di Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, masih menemui permasalahan dalam peningkatan keberdayaannya. Penelitian ini berhasil memetakan 4 (empat) permasalahan utama yang dihadapi berkaitan pemberdayaan pengelola wisata dalam pengelolaan sampah di Pantai Caruban Desa Gedongmulyo Kabupaten Rembang. Pertama, rendahnya akses informasi yang dimiliki pengelola wisata. Kedua, rendahnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ketiga, rendahnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Keempat, rendahnya kapasitas organisasi lokal dalam mengkoordinir masyarakat dalam mengelola sampah.

Beranjak dari berbagai permasalahan ini, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Pantai Caruban di Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Pertama, aksesibilitas informasi kedepannya dapat diperkuat dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi, seperti website maupun media sosial (instagram, tiktok). Kedua, partisipasi/inklusi dapat diperkuat dengan menggencarkan sosialisasi terkait dengan pentingnya pengelolaan sampah, dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai program atau kegiatan pengelolaan sampah. Ketiga, penguatan akuntabilitas dengan menggandeng berbagai pihak-pihak yang berkepentingan (pemerintah desa, pemerintah kabupaten, sektor bisnis, dan lain sebagainya) melalui kerja sama dalam pemenuhan infrastruktur pengelolaan sampah. Keempat, pengelola wisata perlu meningkatkan kapasitas organisasi lokal (Pokdarwis, BUMDes) dengan mengikuti berbagai pelatihan terkait pengelolaan sampah, dimana dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi lokal di Kabupaten Rembang.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung berlangsungnya penelitian ini. Beberapa pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini, antara lain: Pemerintah Desa Gedongmulyo, pengelola BUMDes Desa Gedongmulyo, Pokdarwis Desa Gedongmulyo, dan segenap pengelola Pantai Caruban. Terima kasih peneliti haturkan juga kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, yang telah memfasilitasi penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Adimihardja, Kusnaka dan Harry Hikmat. 2001. *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat – Modul Latihan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Chotimah, Chusnul. 2020. *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Danielson, Joi; Julia Luchesi; Camila Echeverria; Pinky Chandran; Nalini Shekar; and Zulfikar. 2022. *Leave No Trance*. Jakarta: Vital Ocean.
- Hilman, Zaki Hilman; Dion Awfa; Laili Fitria; I Wayan Koko Suryawan; Wisnu Prayogo. 2023. Problematika Sampah di Sektor Perjalanan dan Pariwisata: Kajian Literatur. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*. Vol. 11, No. 3, 2023: 896 – 903.
- Hoesein, Asrul. 2019. *Bank Sampah: Masalah dan Solusi*. Watampone: CV. Syahadah Creative Media (SCM).
- Kumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (Fitratun Annisya & Sukarno, Eds.). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Narayan, Deepa. (ed). (2002). *Empowerment And Poverty Reduction: A Source book*. Washington, DC: PREM - The World Bank.
- Pangestu, D. A., & Indrawati, I. (2021). *Analisa Kebersihan Wisata Watu Jonggol di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi (Kajian Perilaku dan Sebaran Tempat Pembuangan Sampah)*. Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur 2021.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat - Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujarwo, Trisanti, dan Widyaningsih. 2014. *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sutarno NS, 2006. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif – Dasar teori dan terapannya dalam penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Wandersman, Abraham; Jessica Snell-Johns; Barry E. Lentz; David M. Fetterman; Dana C. Keener; Melanie Livet; Pamela S. Imm; dan Paul Flaspohler. 2005. *The Principles of Empowerment Evaluation*. dalam David M. Fetterman dan Abraham Wandersman (ed.). *Empowerment Evaluation Principles in Practice*. London: The Guilford Press. hal. 27-41.
- Wati, L. L., & Sudarti, S. (2021). Analisis Perilaku Wisatawan dalam Membuang Sampah di Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo Kecamatan Ambulu. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 5(2), 1–8.
-